

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi ini, terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah pun diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang baik. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat berguna bagi para pengguna atau *stakeholder*, terutama transparansi kepada masyarakat.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa masih terdapat banyak laporan keuangan yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Dalam suatu pemerintahan, tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten guna memperoleh laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas. Menurut Mardiasmo (2002: 146), sumber daya manusia telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik juga dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). SPI berfungsi memberikan keyakinan tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi

sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. (Herawati, 2014).

Selain SPI, salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Kemudian dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi dalam aplikasi komputer akuntansi pada pemerintah daerah sangat penting dalam membantu aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sehingga lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Menurut Sugiyanto (2002) dalam Efendi, dkk (2017) volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu, peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan kompleks tentu harus

diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Penelitian mengenai kualitas keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Penelitian ini terpacu pada penelitian yang dilakukan Sudiarianti, Ni Made dkk (2015) yaitu menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian ini tanpa menggunakan variabel intervening, dan penulis menambahkan dependen variabel teknologi informasi, serta lingkup penelitian ini adalah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Sukoharjo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai kualitas laporan keuangan sehingga para aparatur pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dan berguna bagi pengembangan teori-teori dalam bidang ekonomi, khususnya akuntansi sektor publik dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana tiap-tiap bab memberikan gambaran mengenai masalah yang dibahas dan dapat diketahui secara jelas mengenai isi skripsi ini. Adapun bab-bab yang akan dibahas meliputi bab-bab berikut ini:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah yaitu meliputi masalah-masalah yang melandasi penelitian ini. Selanjutnya, bab ini membahas tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain yang relevan dan valid.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Bab IV merupakan hasil pembahasan yang menjelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Sukoharjo, kemudian analisis data pengujian hipotesis serta pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan pembahasan keseluruhan penelitian.

Bab V merupakan penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.